

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Jawa Tengah

Halaman 21

Dana Desa Belum Terserap Optimal

SEMARANG- Penyerapan dana desa di Jawa Tengah masih minim dan belum berjalan optimal. Dari total pagu anggaran dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 6,7 triliun, baru terealisasi sekitar Rp 4,03 triliun.

Pada tahap pertama sekitar 20% sebesar Rp 1,34 triliun dan tahap kedua 40% sebesar Rp 2,69 triliun.

Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jateng, Yuni Wibawa mengungkapkan, meskipun sudah tersalurkan sekitar 60% lebih masuk di rekening kas umum daerah (RKD) namun penyerapannya baru sebesar Rp 39 miliar atau 1,5%-nya. Data yang dihimpun hingga 19 Juli lalu tersebut tentunya akan terus berkembang secara dinamis.

"Dari rekening kas umum daerah itu setelah disalurkan tujuh hari maksimal harus sudah ditransferkan ke rekening kas desa," ujar Yuni Wibawa, Kamis (26/7).

Setelah dua tahap penyaluran tersebut, tahap ketiga sisanya sebesar 40%

akan diselesaikan pada September.

Kurang Potensi

Kabupaten yang mendapatkan alokasi terbesar dana desa adalah Pati sebesar Rp 365 miliar disusul Kebumen Rp 350 miliar dan Brebes sebesar Rp 344 miliar. Sementara alokasi terkecil ada di tiga Kabupaten Kudus sebesar Rp 117 miliar, Kabupaten Sukoharjo Rp 126 miliar dan Karanganyar sebesar Rp 138 miliar.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil Jawa Tengah, Sudaryanto menjelaskan, keterlambatan penyerapan dana desa dikarenakan kurangnya potensi masyarakat untuk mengelola dana desa. Hal itu ditunjukkan dengan kurangnya kesiapan pengurusan administrasi di tingkat desa.

"Saat ini sudah hampir 3.500 orang terdiri atas tenaga ahli profesional pendamping desa dan pendamping lokal desa (PLD). Hanya saja saat ini yang mengundurkan diri cukup banyak untuk PLD hampir 500 orang karena berbagai alasan, misalnya jadi kades, perangkat desa, ikut suaminya, dan sebagainya," kata Sudaryanto.

Solusi konkret yang akan diupayakan pihaknya yakni dengan mengusulkan agar dilakukan pengangkatan kem-

bali pendamping lapangan desa (PLD). Para peminat PLD juga memerlukan pelatihan yang baik untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi desa dalam pengelolaan dana desa. (J14-45)

